

**PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT DAN PARTISIPASI
DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA
MANAJERIAL SKPD**
(Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar)

Artikel

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar sarjana Ekonomi Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH:

RETNO NABILA SARI

17786/2010

**KONSENTRASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT DAN PARTISIPASI DALAM
PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SKPD**

Nama : Retno Nabila Sari
BP/NIM : 2010/17786
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda
periode Maret 2015 dan telah diperiksa/ditetujui oleh kedua
pembimbing.

Padang, Januari 2015

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Herlina Helmy, SE, M.S, Ak.
NIP. 19800327 200501 2 002

Pembimbing II



Erlv Mulyani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19800327 200801 2 001

Pengaruh Pengawasan Inspektorat dan Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD

Retno Nabila Sari

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : retnonabilasari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh pengawasan inspektorat dan partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian ini adalah penelitian *kausatif*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Datar yang berjumlah 39 SKPD. Sampel ditentukan berdasarkan metode *judgement sampling*, sebanyak 39 SKPD di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Pengumpulan data dengan kuesioner kepada responden yaitu sejumlah 89 responden yang terdiri dari pejabat setingkat kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian/bidang/subdinas dan kepala subbagian/subbidang/seksipada setiap SKPD. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 16 for windows.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Pengawasan Inspektorat berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD, dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,313 > 1,6657$ (sig $0,024 < \alpha 0,05$) yang berarti H_1 diterima, dan 2) Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD, dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,281 > 1,6657$ (sig $0,025 < \alpha 0,05$) yang berarti H_2 diterima.

Kata kunci: pengawasan inspektorat, partisipasi dalam penyusunan anggaran, dan kinerja manajerial

Abstract

This study aims to determine : the effect of inspectorate supervision and participation in budgeting on managerial performance SKPD In Tanah Datar government. This research is the causative research. The population in this study are all Regional Work units (SKPD) Tanah Datar, amounting to 39 SKPD. The sample is determined based on judgment sampling method, a total of 39 sectors in the Government of Tanah Datar .Collecting of data by questionnaires to respondents, some 89 respondents consisting of an official at the head office / agency / office , head of division / section / subsection and head of sub offices / subfields / sections in each SKPD . Data analysis used multiple regression analysis using SPSS version 16 for Windows.

The results show that : 1) Supervision has Inspectorate positive significant effect on Managerial Performance SKPD, with t count > t table is $2.313 > 1.6657$ (sig $0.024 < \alpha 0.05$) which means that $H1$ is accepted, and 2) Participation in Budgeting has positive significant effect on Managerial performance SKPD, with t count > t table is $2.281 > 1.6657$ (sig $0.025 < \alpha 0.05$) which means that $H2$ is accepted .

Keywords : inspectorate supervision , participation in budgeting , and performance of managerial

1. PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik tercermin dalam pengukuran kinerja manajerial. Kinerja manajerialnya tercermin dalam anggaran yang disusun oleh manajemen. Untuk itu pihak manajemen harus mampu melaksanakan fungsinya dengan sebaik mungkin. Untuk melaksanakan fungsinya dengan baik manajemen membutuhkan alat bantu. Salah satu alat bantu yang digunakan adalah anggaran (*budget*) yang secara umum merupakan suatu perencanaan formal dari seluruh kegiatan dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukur lain, dan mencakup jangka waktu satu tahun (Mulyadi, 2001).

Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor yang dapat dipakai untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Menurut Bastian (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Ukuran kinerja suatu organisasi sangat penting guna evaluasi dan perencanaan masa depan. Beberapa jenis informasi yang digunakan dalam pengendalian disiapkan dalam rangka menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah dilakukan secara efektif dan efisien.

Kinerja manajerial organisasi sektor publik pada dasarnya merupakan tanggungjawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi. Tanggungjawab terhadap organisasi sebenarnya tidak hanya lahir dari pimpinan namun dari individu. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat dan memberikan kontribusi

terbaik mereka terhadap organisasi, maka kinerja manajerial secara keseluruhan akan baik.

Menurut Mardiasmo (2001) Salah satu faktor yang mampu meningkatkan kinerja manajerial diantaranya adalah Pengawasan Inspektorat. Dengan adanya pengawasan ini di setiap tahapan pengelolaan keuangan Pusat, maka diharapkan proses pengelolaan keuangan Pusat terutama dalam proses penyusunan anggaran akan memperbesar pengaruhnya terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja.

Pengawasan inspektorat berfungsi untuk mereview laporan keuangan pemerintah daerah juga untuk membantu instansi menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut (Yosa, 2010). Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada bupati (Mardi, 2009). Tujuan utama dari pengawasan inspektorat ini adalah tidak hanya untuk melakukan tindakan verifikasi melainkan juga dimaksudkan untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara baik guna meningkatkan kinerja. Dalam tatanan otonomi pemerintah Indonesia, pelaksanaan fungsi ini dilaksanakan oleh inspektorat daerah.

Agar pengawasan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukannya peran lembaga-lembaga teknis dan fungsional yang berkaitan dengan tugas pengawasan baik di daerah maupun dipusat secara efektif. Bila ternyata dikemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikendalikan, dan dapat pula segera

diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kinerja unit kerja. Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang terlalu cepat tanpa pengawasan yang cukup justru meningkatkan korupsi daerah. Salah satu cara yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan (Mardiasmo, 2002).

Menurut Kenis dalam Suyanto (2011) kinerja manajer juga dapat diukur dari dimensi *Budgetary Goal Characteristics (BGC)*, diantaranya yaitu *BudgetaryPartisipation* (partisipasi dalam penyusunan anggaran) dan *BudgetGoalClarity* (kejelasan sasaran anggaran). Dimensi *budgetary goal characteristics* tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja. Kinerja akan dikatakan efektif apabila pihak-pihak bawahan mendapat kesempatan terlibat atau berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran.

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pihak yang membuat keputusan tersebut, Mulyadi (2001). Partisipasi penyusunan anggaran adalah suatu proses yang didalamnya terdapat individu yang terlibat dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan target anggaran yang akan di evaluasi dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut (Groveel dalam Suyanto, 2011). Partisipasi mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut. Jadi partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang dalam menyusun dan memutuskan anggaran secara

bersama. Sukses atau tidaknya para staf dalam suatu SKPD dalam melaksanakan anggaran merupakan suatu refleksi langsung tentang keberhasilan ataupun kegagalan manajerial SKPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Penelitian mengenai pengawasan inspektorat dan partisipasi dalam penyusunan anggaran telah dapat membuktikan bahwa pengawasan inspektorat dan partisipasi dalam penyusunan anggaran memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kinerja manajerialSKPD,Sardjito dan Osman (2007) menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD.Penelitian juga dilakukan oleh Salvia (2008) yang menyatakan pengawasan inspektorat berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

Fenomena yg terjadi dilapangan adalah terungkapnya kecurangan yang dilakukan kepala dinas PU Tanah Datar terkait pekerjaan penguatan tebing pada ruas jalan Situmbuak-Supayang Batusangkar yang anggarannya sebesar Rp 450 juta, yang tampaknya sudah melanggar peraturan dan tidak mengacu kepada undang-undang yang berlaku. Para petinggi pada dinas yang mengelola proyek dari uang Negara ini terkesan masih mementingkan keluarga dan sanak kerabat, hal ini terlihat pemberian pekerjaan kepada CV Irza untuk mengerjakan proyek ini. pekerjaan proyek yang tidak melalui peraturan ini, seolah-olah sudah direstui,pasalnya sebelum proyek ini diberikan kepada CV Irza, panitia lelang saja belum lagi terbentuk, begitu juga dengan ULP. Bahkan yang sangat dirisaukan adalah PPTK dan pengawas proyek tahun anggaran 2013 belum lagi mengantongi SK. Dengan kondisi ini jelas dinas PU Tanah datar dan CV Irza terkesan mengabaikan aturan, namun kepala dinas PU ini tidak mempersoalkannya. Disamping dinas PU

Tanah Datar ini telah melabrak Keppres Nomor 70 Tahun 2010, kontraktor yang dipercaya yakni CV Irza juga tidak mengacu kepada RAB, Terkait pernyataan salah seorang pemuka masyarakat setempat yg mengatakan cara kotor yang dilakukan oleh kontraktor dalam pekerjaan ini, dipastikan proyek ini tidak akan bertahan lama dengan adukan semen yang tidak sesuai dengan takaran dan batu kali yang dipasang terdiri dari anak-anak batu yang tidak layak. (mingguan investigasi, 05 Maret 2013)

Untuk itu peneliti mengambil tempat penelitian di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, selain karena masih terbatasnya penelitian pada bidang pemerintahan khususnya di Kabupaten Tanah Datar dan juga disebabkan oleh karena belum efektifnya kinerja yang dicapai pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pengaruh pengawasan inspektorat dan partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan serta memahami tentang kinerja manajerial dan juga dapat memberikan kontribusi atau masukan bagi dunia pendidikan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan dan juga dapat memberikan manfaat sebagai masukan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang lebih berkualitas.

2. TELAAH LITERATUR

Kinerja Manajerial SKPD

Kinerja manajerial adalah seberapa jauh seorang manajer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Kinerja manajerial itu sendiri berhubungan dengan seberapa besar kemampuan setiap level manajemen dalam meningkatkan kinerja baik dari segi kinerja kualitas sumber daya manusia maupun kinerja keuangan (Sinaga dan Narumonrang 2005).

Penilaian Kinerja

Manfaat penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001), yaitu :

- 1) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimal.
- 2) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan.
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
- 4) Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
- 5) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Pengukuran Kinerja

Menurut Bastian (2006) indikator pengukuran kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, 5 komponen yang ada di dalam indikator pengukuran kinerja, yaitu :

- 1) Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Masukan ini terdiri dari perencanaan program tahunan, data dan informasi yang akurat, dan kemampuan karyawan.
- 2) Keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung tercapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik. Keluaran ini terdiri dari kejelasan penetapan anggaran yang disusun dan ketelitian karyawan dalam melaksanakan pekerjaan.
- 3) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil ini berupa kualitas hasil penyusunan anggaran.
- 4) Manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Seperti

pelaksanaan penyusunan anggaran yang terkoordinasi.

- 5) Dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap suatu tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah diterapkan. Hasilnya kinerja pelaksanaan penyusunan anggaran lebih baik.

- e. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

1. Tujuan pengukuran kinerja

Menurut Mardiasmo (2009) secara umum tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down dan bottom up*).
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk pencapaian *goal congruence*.
- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

2. Manfaat pengukuran kinerja

Menurut Bastian (2006), manfaat pengukuran kinerja sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang telah disepakati.

2. Pengawasan inspektorat

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja diperlukan pengawasan yang optimal. Dalam pelaksanaannya pengawasan diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan di daerah harus diikuti pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan harus dilakuka sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) dan didukung partisipasi semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung (La Ode, 2005)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 1 menyebutkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan menurut keputusan presiden no. 74 tahun 2001 tentang cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Pengertian pengawasan inspektorat

Inspektorat yang selanjutnya disebut inspektorat daerah adalah aparat

pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati. Berdasarkan PP No. 41 tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Inspektorat dipimpin oleh inspektur dimana didalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada bupati/ walikota.

Pengawasan inspektorat juga dimaksudkan untuk : 1) meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan mewujudkan aparatur yang profesional, bersih, dan bertanggungjawab, 2) memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN, 3)menegakkan peraturan yang berlaku, 4) mengamankan keuangan negara

Peran dan fungsi inspektorat pemerintah daerah

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 Menteri/ pimpinan lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern Inspektorat perlu melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi

Pengawasan intern dilakukan oleh inspektorat daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah dengan tugas pokoknya antara lain:

- a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2009, indikator Kinerja Inspektorat sebagai berikut :

- a) Dilakukannya pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
 - b) Dikembangkannya sistem informasi evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi dan berjalan sesuai dengan rencana.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai berikut :
 - a) Dirumuskannya prosedur yang menggambarkan langkah-langkahnya untuk memenuhi kebijakan dan dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan.
 - b) Ditetapkannya kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah.
 - c. Menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2009, indikator kinerja inspektorat sebagai berikut :

- a) Dilaksanakannya SPI atas pengelolaan keuangan daerah oleh SKPD
 - b) Dilaksanakannya transaksi penerimaan, penyetoran, dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD
 - c) Tersusunnya laporan keuangan dan pertanggung jawabannya pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.
- d. Menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009 indikator kinerja inspektorat sebagai berikut :

- a) Dilaksanakannya pelaporan keuangan SKPD yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan daerah yang terdiri atas laporan

realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

- b) Dilaksanakannya sistem informasi yang tepat, lengkap dan akurat.

3. Partisipasi Penyusunan Anggaran

Menurut Noerdiawan (2008), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*). Anthony dan Govindarajan (2005) mengemukakan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi.

Fungsi Anggaran

Menurut Noerdiawan (2008) beberapa fungsi anggaran sektor publik dalam manajemen sektor publik adalah :

- 1) Anggaran sebagai alat perencanaan
Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan kearah mana kebijakan akan dibuat.
- 2) Anggaran sebagai alat pengendalian
Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).
- 3) Anggaran sebagai alat kebijakan
Melalui anggaran, organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu.
- 4) Anggaran sebagai alat politik
Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.
- 5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian, unit kerja, atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.

- 6) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.
- 7) Anggaran sebagai alat motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan cacatan, anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat “menantang tetapi masih mungkin untuk dicapai” (*challenging but attainable* atau *demanding but achievable*). Maksudnya adalah suatu anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai.
- 8) Anggaran sebagai alat pengendalian
Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah adalah menunjukkan pada seberapa besar keterlibatan aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran daerah dan diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui negosiasi terhadap anggaran. Hal ini sangat penting, karena aparat pemerintah daerah akan merasa produktif dan puas terhadap pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang akan meningkatkan kinerjanya. Kunci dari kinerja yang efektif adalah apabila tujuan

dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan atau para staf memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan (Kenis, 1979 dalam Bangun, 2009).

Menurut Soobaroyen (2005) dalam Rahmiyati (2013) indikator partisipasi dalam penyusunan anggaran terdiri dari :

- 1) Pengaruh terhadap penetapan anggaran
Keikutsertaan atasan maupun bawahan dalam penyusunan anggaran memiliki pengaruh terhadap penetapan anggaran, semakin tinggi partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran, maka akan memberikan peluang bagi bawahan dalam menetapkan standar anggaran yang telah ditetapkan.
- 2) Seringnya atasan meminta pendapat / usulan saat anggaran disusun, maka semakin ada ruang bagi bawahan dalam memasukkan nilai positif dalam penetapan sasaran anggaran.
- 3) Keputusan dalam penetapan anggaran
Semakin tinggi tingkat partisipasi bawahan dalam [penyusunan anggaran, maka bawahan akan cenderung dapat mempengaruhi atasan dalam penetapan keputusan anggaran demi kepentingan organisasi.
- 4) Mengajak atasan untuk mendiskusikan anggaran yang diusulkan
- 5) Pengaruh usulan bawahan yang tercermin dalam usulan final
- 6) Menilai kontribusi bawahan terhadap anggaran
- 7) Frekuensi bawahan dimintai usulan ketika anggaran sedang disusun

Penelitian Terdahulu

Penelitian Salvia (2008) meneliti tentang pengaruh pengawasan inspektorat dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja manajerial SKPD. Penelitian ini dilakukan pada pemkab solok, dan hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan inpektorat dan pengelolaan keuangan

daerah berpengaruh positif terhadap kinerja unit SKPD.

Penelitian Mardiana (2010) menguji tentang Pengaruh Partisipasi penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Motivasi sebagai variabel Pemoderasi. Sampel penelitian adalah Pemerintah Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Selanjutnya Ramendei (2009) meneliti tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran dan evaluasi anggaran serta sistem pengendalian intern terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan mengambil sampel pegawai SKPD di Jayapura. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan kesulitan sasaran anggaran tidak mempengaruhi kinerja manajerial pemerintah daerah, namun sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori diatas yang dapat dijelaskan bahwa pengawasan inspektorat dan partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD.

Kinerja manajerial aparatur pemerintah merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi pemerintahan dengan melihat kinerja pimpinan atau kepala organisasi pemerintahan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajerial dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pada khususnya.

Inspektorat daerah sebagai pengawas internal memiliki peran yang sangat strategis, sebagai katalisator dan dinamisator dalam meningkatkan kinerja aparatur dan menyukkseskan pembangunan

daerah. Anggaran yang disusun secara partisipatif merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja unit kerja organisasi. Partisipasi anggaran melibatkan pimpinan dan bawahan dalam proses penyusunannya, sehingga kinerja mereka diukur berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam anggaran. Target penyusunan anggaran yang dicapai akan mencerminkan kinerja unit kerja organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 1

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausatif. Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat dengan dua variabel atau lebih. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam hal ini menjelaskan serta memperlihatkan pengaruh pengawasan inspektorat dan partisipasi penyusunan anggaran sebagai variabel bebas terhadap kinerja manajerial SKPD sebagai variabel terikat pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Agam berjumlah 39 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Inspektorat.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *judgement sampling*. Metode ini memilih sampel berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitian.

Untuk menentukan berapa sampel yang diambil, digunakan rumus *slovin* dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N(\alpha)^2}$$

$$= \frac{780}{1 + 780(0,1)^2}$$

$$= 89$$

Responden pada penelitian ini adalah pejabat setingkat kepaladinas, kepala bagian/bidang/subdinas kepalasubbagian /subbidang/seksi dari SKPD yang ada di Kabupaten Tanah Datar

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik sekelompok orang/seseorang yang menjadi subjek penelitian (responden). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pernyataan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner disebarkan langsung ke responden, demikian pula pengembalannya dijemput sendiri sesuai dengan janji pada kantor instansi pemerintah tersebut. Responden diharapkan mengembalikan ke-mbali kuesioner pada peneliti dalam waktu yang telah ditentukan.

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu: Sangat Setuju (SS), Se-tuju (S), Ragu-Ragu (RR), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Variabel yang diukur dalam kuesioner: pengawasan inspektorat, partisipasi dalam penyusunan anggaran, dan kinerja manajerial SKPD

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan rumus korelasi *Product Moment*. jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka nomor item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas, selanjutnya akan dilakukan pengujian reliabilitas, yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Instrumen dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha* (α) dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 16.0. Umar (2005) menyatakan cara mengukur reliabilitas dengan *Cronbach Alpha's* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kurang dari 0.6 tidak reliabel
- b. 0.6-0.7 dapat diterima
- c. 0.7-0.8 baik
- d. Lebih dari 0.8 reliabel

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif
 - a. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab lengkap oleh responden.

- b. Menghitung Nilai Jawaban
 Karena penelitian ini menggunakan data primer maka nilai jawaban dihitung menggunakan rumus:

Rata-Rata Skor

$$= \frac{(5 SS) + (4 S) + (3 KS) + (2 TS) + (1 STS)}{15}$$

Dimana:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Menghitung nilai rerata jawaban responden menggunakan rumus :

$$\text{Mean} = \sum_{h=1}^n xi$$

Dimana :

xi = Skor total

n = Jumlah responden

Maka tingkat capaian responden (TCR) dihitung dengan:

$$\text{TCR} = \frac{\text{Rata-Rata Skor}}{5}$$

Pada penelitian ini hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan metode *Regresi Berganda (Multiple Regression)*. Variabel Penerapan Sistem Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi sebagai variabel bebas dan variabel Kecurangan sebagai variabel terikat.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual

Pengujian normalitas dapat digunakan untuk menguji apakah data kontinue

berdistribusi normal sehingga dengan analisis validitas, reliabilitas, uji-t, korelasi dapat dilaksanakan. Uji normalitas dilakukan dengan metode *kolmogrov smirnov*, dengan melihat nilai signifikansi pada 0,05. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan $>0,05$ maka data akan berdistribusi normal.

2. Uji Multikoloniaritas

Multikoloniaritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan lainnya. Dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) < 10 dan *tolerance* $> 0,10$.

3. Uji Heterokedastisitas.

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari suatu pengamatan ke pengamatan lain.

Uji Model

1. Uji F (F-test).

Uji F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali,2006:84).

2. Koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjust R²*).

Digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. *Adjust R²* berarti *R²* sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup didalam perhitungan *Adjust R²*. Untuk membandingkan dua *R²*, maka harus memperhitungkan banyaknya variabel X yang ada didalam model.

Uji Hipotesis

Uji t dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik.

Untuk melihat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, diuji pada tingkat $\alpha = 0,05$.

Kesimpulan hipotesis yang disajikan untuk H_1 , dan H_2 didasarkan atas:

1. Jika tingkat signifikansi $< \alpha = 0,05$ dan memiliki koefisien β negatif, maka hipotesis nul (H_0) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_1 dan H_2) diterima.
2. Jika tingkat signifikansi $> \alpha = 0,05$ dan memiliki koefisien β positif, maka hipotesis nul (H_0) diterima, dan hipotesis alternatif (H_1 dan H_2) ditolak.

Definisi Operasional

1. Kinerja manajerial

Kinerja manajerial adalah kecakapan manajer suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf, negosiasi dan representasi.

2. Pengawasan Inpektorat

Pengawasan Inspektorat adalah suatu aktivitas pihak independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa.

3. Partisipasi dalam penyusunan anggaran

Partisipasi dalam penyusunan anggaran menunjukkan keterlibatan penyelenggaraan penyusunan anggaran di setiap satuan kerja perangkat daerah dengan nilai dan norma yang dimiliki pihak yang berkepentingan. Partisipasi menyeluruh dapat dibangun dengan kebebasan mengungkapkan pendapat dan memberikan saran dan kritik secara konstruktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Jumlah populasi penelitian ini adalah 780 manajer atau pimpinan SKPD di Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari

pimpinan level atas, menengah, dan bawah. Dari jumlah populasi tersebut ditentukan sampel penelitian dengan menggunakan rumus *slovin*, sehingga di dapat jumlah responden penelitian sebanyak 89 orang manajer SKPD. Jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 89 responden di 39 SKPD yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Jumlah responden yang mengembalikan kuesioner adalah 77 responden dan semuanya mengisi dengan lengkap. Kuesioner diantarkan langsung kepada masing-masing responden. Rentang waktu penyebaran dan pengumpulan kuesioner adalah tanggal 10 November 2014 s/d 01 Desember 2014.

Statistik Deskriptif

Sebelum dilakukan pengujian data secara statistik dengan lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pendeskripsian terhadap variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang akan diteliti.

Tabel 1

Dari Tabel 1 di atas diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 77 respondendari 39 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanah Datar. Untuk variabel Kinerja Manajerial SKPD tersebut diketahui memiliki nilai rata-rata sebesar 40,65 dengan deviasi standar 4,97, nilai tertinggi 50,00 dan nilai terendah 26,00. Untuk variabel penawasan inspektorat memiliki nilai rata-rata sebesar 41,62 dengan deviasi standar 3,97, nilai tertinggi 50,00 dan nilai terendah 30,00. sedangkan untuk variabel partisipasi penyusunan anggaran memiliki nilai rata-rata sebesar 29,73 dengan deviasi standar 2,99 nilai tertinggi dan terendah masing-masing sebesar 35,00 dan 23,00.

Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Colleration*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 77$, adalah 0,189.

Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Colleration* untuk masing-masing item variabel Y, X_1 dan X_2 di atas r_{tabel} . Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan adalah valid.

Tabel 2

Dari Tabel 2 di atas dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen Kinerja Manajerial SKPD diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,642, untuk instrumen Pengawasan Inspektorat nilai terkecil 0,320, untuk instrumen Partisipasi Penyusunan Anggaran nilai terkecil 0,246.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauhmana hasil penelitian tetap konsisten. Berikut ini merupakan tabel nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing instrumen:

Tabel 3

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel diatas yaitu untuk instrumen Kinerja Manajerial SKPD 0,922, untuk instrumen Pengawasan Inspektorat 0,794, untuk instrumen Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran 0,735. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran diatas 0,6. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

Uji Normalitas Residual

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05. Dari Tabel 3 di atas terlihat bahwa hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,755 dengan signifikan 0,619. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas $> 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikoloniaritas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *tolerance value* di atas 0,10 dan $VIF < 10$. Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam Tabel di atas menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada di atas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Hasil yang diperoleh dapat dilihat tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel AbsUt. Tingkat signifikansi $> \alpha 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji F (F-Test)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak.

Dari hasil analisis data yang diperoleh mengenai Pengawasan Inspektorat dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan. Hasil pengolahan statistik analisis regresi menunjukkan nilai $F = 11,212$ yang signifikan pada level 0,000. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $11,212 > 3,12$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi yang

digunakan sudah *fix*, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variabel-variabel penelitian. Dari hasil pengujian juga dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Inspektorat dan Partisipasi Penyusunan Anggaran secara bersama-sama atau secara silmutan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial SKPD.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat atau mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Dari tampilan *output SPSS model summary* pada Tabel 20 di atas besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,212. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel Pengawasan Inspektorat dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap variabel terikatnya yaitu Kinerja Manajerial SKPD adalah sebesar 21,2%, sedangkan 78,8% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Koefisien Regresi

Dari pengolahan data dengan menggunakan regresi berganda diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 12,691 - 0,348 X_1 - 0,454 X_2 + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

- a. Nilai konstanta sebesar 12,691 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu Pengawasan Inspektorat dan Partisipasi Penyusunan Anggaran adalah nol maka nilai kinerja manajerial SKPD adalah sebesar konstanta 12,691.
- b. Koefisien Pengawasan Inspektorat sebesar 0,348 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan Pengawasan Inspektorat satu satuan akan mengakibatkan peningkatan Kinerja Manajerial SKPD sebesar 0,348 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

- c. Koefisien Partisipasi Penyusunan Anggaran sebesar 0,454 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan Partisipasi Penyusunan Anggaran maka akan mengakibatkan peningkatan Kinerja Manajerial SKPD sebesar 0,454 dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji Hipotesis (t-test)

Uji t statistik (*t-Test*) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) 1,6657.

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini :

1. Pengawasan Inspektorat berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel atau nilai sig < α 0,05. Nilai t tabel pada α 0,05 adalah 1,6657. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa t hitung > t tabel yaitu 2,313 > 1,6657 atau nilai signifikansi 0,024 < α 0,05. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,348. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa Pengawasan Inspektorat (X_1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Sehingga hipotesis pertama dari penelitian ini **diterima**.

2. Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD

Untuk variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_2) nilai t hitung adalah 2,281 dan nilai sig adalah 0,025. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa t hitung > t tabel yaitu 2,281 > 1,6657 atau

nilai signifikansi $0,025 < \alpha$ 0,05. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,454. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran (X_2) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Sehingga hipotesis kedua dari penelitian ini **diterima**.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengawasan Inspektorat terhadap Kinerja Manajerial SKPD

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan inspektorat berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikannya yaitu 0,024 (kecil dari $\alpha=0,05$). Dari hasil analisis regresi berganda terlihat bahwa peningkatan pengawasan inspektorat satu satuan, maka akan meningkatkan kinerja manajerial SKPD sebesar 0,348. Ini berarti bahwa hubungan antara pengawasan inspektorat searah dengan kinerja manajerial SKPD.

Menurut Mardi (2008), pengawasan inspektorat memiliki peran yang sangat strategis, sebagai katalisator dan dinamisator dalam meningkatkan kinerja aparatur dan menyukseskan pembangunan daerah. Fungsi inspektorat dalam proses mereview laporan keuangan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masukan yang diberikan inspektorat dalam proses review ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP dan akan menggambarkan pencapaian kinerja yang diharapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengawasan inspektorat maka semakin baik pula kinerja manajerial SKPD tersebut. Selain itu menurut PP No. 41 tahun 2007, tujuan utama dari pengawasan inspektorat tidak hanya untuk melakukan tindakan verifikasi, melainkan juga dimaksudkan untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya

secara baik guna meningkatkan kinerja organisasi yang diawasi.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Salvia (2008) meneliti tentang pengaruh pengawasan inspektorat dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja manajerial SKPD. Penelitian ini dilakukan pada Pemkab Solok, dan hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan inspektorat dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2012) mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial, diantaranya adalah pengawasan inspektorat berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD.

2. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD

Dari hasil pengujian hipotesis kedua ditemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,025 < 0,05$. Dari hasil analisis regresi berganda terlihat bahwa peningkatan partisipasi penyusunan anggaran satu satuan, maka akan meningkatkan kinerja manajerial SKPD sebesar 0,454. Ini berarti bahwa hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran searah dengan kinerja manajerial SKPD. Artinya semakin tinggi partisipasi dalam penyusunan anggaran, maka kinerja manajerial SKPD akan semakin meningkat.

Menurut Mulyadi (2001), partisipasi mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut. Jadi partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang dalam menyusun dan memutuskan anggaran secara bersama. Sukses atau tidaknya staf dalam suatu SKPD dalam melaksanakan

anggaran merupakan suatu refleksi langsung tentang keberhasilan ataupun kegagalan manajerial SKPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Disamping itu tingkat partisipasi para staf dalam penyusunan anggaran akan mendorong moral kerja yang tinggi dan inisiatif manajerial SKPD.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Bambang (2002) yang menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan Kinerja (prestasi) yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Adanya partisipasi mendorong setiap orang untuk meningkatkan prestasinya dan bekerja keras dan menganggap bahwa target organisasi merupakan target pribadinya juga. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Bangun (2009) meneliti tentang Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial partisipasi dalam penyusunan anggaran dan struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran memungkinkan bawahan mengkomunikasikan apa yang mereka butuhkan kepada atasannya dan partisipasi dapat memungkinkan bawahan untuk memilih tindakan yang dapat membangun komitmen dan dianggap sebagai tanggung jawab atas apa yang telah dipilih. Dengan begitu maka bawahan akan bersungguh-sungguh untuk mencapai target anggaran karena mereka ikut terlibat dalam penyusunannya. Sehingga dengan begitu maka anggaran yang telah disusun tersebut dapat terealisasi dengan baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja manajerial SKPD.

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh pengawasan inspektorat dan partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan Inspektorat berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.
2. Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

B. Keterbatasan dan saran penelitian

Meskipun penelitian ini telah dirancang dan direncanakan semaksimal mungkin namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu direvisi penelitian selanjutnya antara lain:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 21,2%. Sedangkan 78,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja manajerial SKPD
2. Kuisisioner yang peneliti sebarakan masih terdapat keterbatasan, karena pernyataan dalam kuisisioner hanya menggunakan pernyataan positif saja. Sehingga menyebabkan responden diarahkan untuk pilihan jawaban yang baik atau positif saja.

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Penelitian ini masih terbatas pada pengawasan inspektorat dan partisipasi penyusunan

anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kinerja manajerial SKPD.

2. Untuk penelitian selanjutnya, apabila peneliti juga menggunakan kuisisioner yang sama sebaiknya pernyataan pada kuisisioner dimodifikasi dengan pernyataan negatif, agar benar-benar menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada praktek atau penerapan yang ada dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- La Ode, Husen.2005. *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: CV.Utomo.
- Mardi.2009.Peran Inspektorat Daerah sebagai Pengawas Internal. *Artikel*.http://203.130.196.151/adm-in19/detail_artikel/(12Agustus 2010).
- Mardiana, Septi. 2010. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Motivasi sebagai Variabel Pemoderasi. Skripsi Program S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Mardiasmo. 2001. *Desentralisasi Sistem dan Desentralisasi Fiskal*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta :

Penerbit Andi.

- Mulyadi. 2001. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Noerdiawan, Deddi. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit. Salemba 4 : Jakarta.
- Ramendei, Philipus. 2009. Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. Tesis Program S-2 Universitas Diponegoro (tidak dipublikasikan).
- Salvia. 2008. Pengaruh Pengawasan, Inspektorat dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja manajerial SKPD. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Soobaroyen, teeroven. 2005. *Management Control System and Disfuntional Behavioran Emprical Investigation*. United Kingdom. University of Wales
- Yosa.2010. Pengertian Pengawasan. [http://itjen-depdari.go.id/\(1](http://itjen-depdari.go.id/(1) Juli 2010).

Dokumen dan Literatur penunjang

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009."Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah". Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007."Perangkat Daerah". Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS DATA PENELITIAN

KinerjaManajerial SKPD (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	77	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	77	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,922	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KM1	36,5584	20,355	,642	,918
KM2	36,5974	19,612	,816	,908
KM3	36,6104	19,636	,719	,913
KM4	36,6234	18,975	,757	,912
KM5	36,6364	19,761	,743	,912
KM6	36,6364	19,945	,643	,918
KM7	36,5714	20,511	,703	,914
KM8	36,5584	20,987	,727	,914
KM9	36,5065	20,806	,709	,914
KM10	36,5455	21,251	,652	,917

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
40,6494	24,704	4,97035	10

PengawasanInspektorat (X₁)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	77	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	77	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,794	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PI1	37,3896	13,030	,439	,779
PI2	37,2987	12,949	,353	,794
PI3	37,2208	13,227	,536	,770
PI4	37,3377	13,227	,472	,776
PI5	37,4286	12,748	,537	,767
PI6	37,3506	13,599	,515	,774
PI7	37,5714	12,774	,534	,768
PI8	37,5844	11,904	,581	,761
PI9	37,6104	13,215	,442	,779
PI10	37,8182	13,940	,320	,792

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
41,6234	15,764	3,97041	10

PartisipasidalamPenyusunanAnggaran(X₂)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	77	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	77	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,735	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PPA1	25,4026	7,033	,322	,738
PPA2	25,4156	6,009	,562	,674
PPA3	25,4286	6,195	,627	,658
PPA4	25,3766	7,212	,438	,707
PPA5	25,3506	7,020	,554	,685
PPA6	25,4026	7,244	,461	,703
PPA7	25,9870	7,566	,246	,749

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
29,7273	8,990	2,99840	7

STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Y	77	24,00	26,00	50,00	40,6494	4,97035	24,704
X1	77	20,00	30,00	50,00	41,6234	3,97041	15,764
X2	77	12,00	23,00	35,00	29,7273	2,99840	8,990
Valid N (listwise)	77						

UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		77
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,35423323
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,074
	Negative	-,086
Kolmogorov-Smirnov Z		,755
Asymp. Sig. (2-tailed)		,619

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,720	1,390
	X2	,720	1,390

a. Dependent Variable: Y

3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,539	3,908		-,906	,368
	X1	,037	,099	,051	,377	,707
	X2	,174	,131	,178	1,330	,188

a. Dependent Variable: ABSUT

UJI HIPOTESIS

1. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,482 ^a	,233	,212	4,41268

a. Predictors: (Constant), X2, X1

2. Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	436,622	2	218,311	11,212	,000 ^a
	Residual	1440,910	74	19,472		
	Total	1877,532	76			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

3. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,691	5,932		2,139	,036
	X1	,348	,150	,278	2,313	,024
	X2	,454	,199	,274	2,281	,025

a. Dependent Variable: Y